

# PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN STUDI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI

Aryan Torrido

IAIN Sunan Kalijaga

e-mail : torridoaryan@yahoo.co.id

## ABSTRAK

*To reduce poverty rates in Indonesia, the government has introduced a program called PNPM Mandiri since 2007. The program aims to improve the quality of life and employment opportunities for the poor that is based on self-empowerment. The program is expected to be an effective tool to address poverty as is done by and for the community itself. Cooperation between the parties involved (the public, local governments and other interested parties) is critical to its success. As a priority, PNPM Mandiri is being focused on the provision and improvement of social and economic facilities, the provision of micro-loans to start economic activities for the poor, and to improve the ability of the public and local governments with training in business skills, organizational and financial management, as well as the implementation of governance good. So far there are some difficulties encountered during the implementation of programs.*

*Keywords: Poverty, PNPM Mandiri and Programs*

---

## PENDAHULUAN

---

Realitas pembangunan Indonesia kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai lebih dari enam persen ternyata tidak merata. Orang kaya semakin kaya, sedangkan kelompok miskin semakin tertinggal. Realitas itu tergambar dari koefisien Gini atau indikator kesenjangan pendapatan yang memburuk. Pada 2011, indeks Gini negara kita mencapai 0,41. Angka tersebut merupakan yang tertinggi, setidaknya sejak 1999. Ini berarti ketimpangan pendapatan semakin lebar. Selama 1999-2010, indeks Gini Indonesia berkisar pada angka 0,32-0,37. Diperkirakan, 20 persen kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi menguasai hampir setengah pendapatan nasional. Sebaliknya, 40

persen kelompok masyarakat berpenghasilan rendah hanya mendapat jatah 16,85 persen. Pada awal reformasi, kelompok miskin masih menikmati 21,66 persen pendapatan, sementara penguasaan kelompok teratas baru 40,57 persen.

Kondisi perekonomian Indonesia juga dipengaruhi oleh krisis ekonomi global yang melanda hampir seluruh negara di dunia mulai kuartal III tahun 2008 juga mengombang-ambingkan harga saham dan tingkat kurs yang akan mengakibatkan semakin tingginya biaya produksi dan memperbesar angka pengangguran. Hal inilah yang mengakibatkan angka kemiskinan semakin besar jika pemerintah tidak segera turun tangan dan hal ini dapat mengakibatkan tingkat kriminalitas yang tinggi serta kerusakan seperti yang terjadi di negara-negara tetangga seperti Thailand dan India. Berkaitan dengan krisis ekonomi glob-

al yang terjadi, pemerintah merencanakan untuk tidak meminta bantuan keuangan dari IMF (Marwan, Makar, 2008). Jumlah kemiskinan Indonesia berdasarkan data *World Bank*, terlihat bahwa jumlah kemiskinan mengalami penurunan secara *gradual*, pada Maret 2010 sebanyak 31, 02 juta atau 13,33 persen dari total 222 juta penduduk. Pada Maret 2011 mengalami penurunan sebanyak 1 juta orang, sehingga total penduduk miskinnya sebanyak 30,02 juta orang atau 12,49 persen dari penduduk Indonesia, kemudian berkurang 0,89 juta orang atau sekitar 29,13 juta jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2012.

Sudah banyak pihak memahami bahwa kemiskinan bersifat multidimensional, artinya kemiskinan bukan hanya disebabkan masalah ekonomi semata, tetapi juga terkait dengan kemunduran di bidang politik, kebudayaan dan keamanan. Oleh karena itu upaya menanggulangi kemiskinan harus dilakukan secara terintegrasi dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat dan komponen-komponen bangsa lainnya.

Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan antara lain lewat Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Sejak tahun 2007, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengeluarkan kebijakan dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja dalam bentuk program nasional PNPM Mandiri.

### **Konsep dan Pengertian Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Pada dasarnya kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi pertama, kemiskinan absolut, dimana dengan pendekatan ini diidentifikasi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Kedua, kemiskinan relatif, yaitu pangsa

pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan (Todaro, 2004) Ada beberapa pendapat mengenai pengertian kemiskinan, antara lain : kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Kemiskinan adalah kegagalan suatu sistem masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya dan dana secara adil kepada anggota masyarakat, selain itu ada yang berpendapat bahwa penduduk dikategorikan miskin jika memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan (Todaro, 2004)

Menurut Susenas 2012, garis kemiskinan pada Februari 2011 yang ditetapkan sebesar Rp 234.000 per kapita per bulan. Terdapat penurunan garis kemiskinan mencapai 8,3 persen masih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi 4,7 persen pada Oktober 2012, semakin tinggi garis kemiskinan berarti semakin banyak penduduk yang tergolong miskin. Komoditas makanan berpengaruh amat menentukan terhadap garis kemiskinan. BPS mencatat, pada Februari 2010, makanan berkontribusi 70,54 persen terhadap garis kemiskinan. Namun, kontribusi kebutuhan makanan baik hingga 74,99 persen pada Maret 2011 akibat naiknya harga barang kebutuhan pokok. Secara khusus, porsi pengeluaran untuk membeli beras terhadap garis kemiskinan mencapai 34,9 persen bagi penduduk pedesaan dan 25,9 persen untuk penduduk perkotaan. Padahal, harga beras rata-rata terus meningkat dari Rp 5.803 per kilogram pada Agustus 2010 menjadi Rp 7.325 per kilogram pada Agustus 2012. Komoditas non-makanan yang turut menentukan garis kemiskinan antara lain perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan.

Batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Badan Pusat Statistik menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan perkapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan

digunakan patokan 2100 kalori per hari dan kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa (Todaro,2004).

### Gambaran Kemiskinan di Indonesia

Perkembangan penduduk miskin di Indonesia selama periode 2010 – 2012 menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun yaitu dari 31,02 juta (13,33%) menjadi 30,02 juta (12,49%) pada tahun 2012 kemudian menjadi 29,13 juta (11,96%). Dari tabel di bawah terlihat bahwa sebagian besar penduduk miskin terdapat di daerah pedesaan yaitu sebesar 18,48 juta pada bulan Maret 2012 dibandingkan di daerah perkotaan yang sebesar 10,64 juta orang. Kalau melihat dari data kemiskinan ini menunjukkan bahwa pembangunan kesejahteraan sosial masih belum menyentuh secara menyeluruh ke pedesaan, kalau melihat kondisi tersebut perlu adanya skala prioritas pembangunan jangka panjang di Indonesia yang menitikberatkan pada pembangunan desa, khususnya desa-desa miskin yang jumlahnya sekarang mencapai 27 ribu desa, ini tersebar di bagian selatan Jawa, Papua, Bengkulu, Jambi, Aceh, Lampung dan Kalimantan Tengah, dengan adanya skala prioritas tersebut secara tidak langsung dapat mengurangi penduduk miskin Indonesia. Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut juga dipengaruhi oleh adanya penurunan inflasi, sehingga fluktuasi kenaikan harga barang tidak begitu tinggi dan cenderung stabil, prediksi saya kemungkinan untuk tahun ini ada sedikit kenaikan jumlah penduduk miskin karena didorong kenaikan 4,3 % Tarif Dasar Listrik (TDL) yang akan diberlakukan 1 april 2013, kebijakan ini sangat berpengaruh dalam kegiatan produktivitas yakni mendorong kenaikan harga barang atau jasa.

Dari Tabel 1 dapat dilihat juga bahwa jumlah 30,02 juta penduduk miskin pada Susenas Maret 2011, 18,8 juta merupakan penduduk yang tahun sebelumnya sudah tergolong miskin, 11,4

juta merupakan penduduk miskin baru, sedangkan 13,8 juta penduduk yang keluar dari kemiskinan. Jadi dalam hal ini terdapat pergeseran dari yang sebelumnya tidak miskin menjadi miskin sebanding dengan jumlah penduduk yang keluar dari kategori miskin.

**Tabel 1**  
**Mutasi Penduduk Miskin di Indonesia**  
**Maret 2010 – 2012**  
**(jutaan)**

Periode	Keterangan	Perkotaan	Pedesaan	Jumlah
Maret 2010	Penduduk Miskin	11,09	19,92	31,02
	Penduduk keluar dari kemiskinan	4,5	7,7	12,2
	Penduduk tetap miskin	7,3	11,0	18,3
	Penduduk menjadi miskin	4,6	8,9	13,5
Maret 2011	Penduduk Miskin	11,04	18,97	30,02
	Penduduk keluar dari kemiskinan	4,6	9,2	13,8
	Penduduk tetap miskin	6,7	12,1	18,8
	Penduduk menjadi miskin	4,6	6,8	11,4
Maret 2012	Penduduk Miskin	10,64	18,48	29,13

Sumber: Susenas

### Penyebab Kemiskinan

Banyak faktor yang menjadi penyebab kemiskinan. Menurut Sharp et al (1996) Dari sisi ekonomi penyebab kemiskinan adalah adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan; adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia yang rendah mengakibatkan produktivitas rendah dan akhirnya upahnya juga rendah; dan adanya perbedaan akses dalam modal. Selain itu ada beberapa pendapat mengenai penyebab kemiskinan, yaitu antara lain karena sistem sosial, ekonomi, dan politik yang berlaku tidak adil pada masyarakat, sebagai akibat pengaruh kebijakan ekonomi

global dan budaya korupsi yang telah mengakar dalam pemerintahan. Lebih jauh akar penyebab kemiskinan bisa dilihat dari Gambar 1 berikut ini.



**Gambar 1**  
**Lingkaran Setan Kemiskinan (*The Vicious Circle of Poverty*)**

Dari gambar di atas terlihat bahwa seseorang itu miskin karena memang dia itu miskin. Karena kemiskinannya maka produktivitas seseorang rendah, akibat selanjutnya pendapatan juga rendah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Karena itulah mereka tidak bisa menabung, padahal tabungan adalah sumber utama pembentukan modal masyarakat. Akibat selanjutnya adalah produksi rendah. Karena pendapatan rendah, maka daya beli untuk berbagai macam kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, papan, sandang, sarana dan prasarana juga rendah, dan akhirnya mereka tetap dalam kondisi miskin. Untuk bisa mengatasi masalah tersebut, maka lingkaran setan kemiskinan itu harus diputus dengan cara memberi bantuan modal dan pendampingan.

### Dampak Kemiskinan

Masih tingginya angka kemiskinan membuat prihatin banyak pihak. Di bawah ini beberapa dampak kemiskinan antara lain: banyak masyarakat menderita busung lapar karena kekurangan asupan gizi; akses untuk menempuh pendidikan terbatas dan tingginya angka putus sekolah; tingginya kriminalitas;

lingkungan sanitasi buruk; semakin tingginya angka bunuh diri/stress; dan memungkinkan munculnya perdagangan perempuan dan anak-anak (*trafficking*).

Beberapa kebijakan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan antara lain adalah pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi BBM pada sekitar 19,2 juta rumah tangga, pemberian beras untuk rakyat miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Operasional Sekolah. Beberapa kebijakan anti kemiskinan di atas secara tidak langsung dapat memperkuat kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin. Pemberian Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp 100.000 per bulan (diberikan 3 bulan sekaligus) kepada keluarga miskin untuk sejumlah 19,1 juta dengan jumlah dana Rp 14,1 triliun. Selain itu pemerintah juga memberikan kompensasi dalam bentuk lain, yaitu Program Ketahanan Pangan; harga raskin yang semula direncanakan dinaikkan menjadi Rp 1900/kg. Jangka waktu pembagian Raskin kepada 19,1 juta rumah tangga diperpanjang dari semula 10 bulan menjadi 12 bulan; dukungan Biaya Pendidikan Anak bagi PNS Gol I/II, Tamtama TNI/Polri; dan tambahan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Harga BBM per 24 Mei 2009 ([www.sit-eresources.worldbank.com](http://www.sit-eresources.worldbank.com), 2013)

Sejak tahun 2007 (yang mulai dirintis tahun 2006), pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja dalam bentuk PNPM Mandiri. Hal ini erat kaitannya dengan pencapaian tujuan pembangunan milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*). MDGs adalah kesepakatan global untuk mencapai target pembangunan bersama yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan; pendidikan dasar untuk semua; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; mengurangi angka kematian anak; meningkatkan kesehatan ibu; memerangi penyakit menular dan penyakit lain-

nya; menjamin kelestarian lingkungan hidup; dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan (www.undp.or.id, 2013)

### **Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri**

PNPM Mandiri adalah program nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Adapun pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan adalah berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Secara lebih rinci tujuan khusus PNPM Mandiri sebagai berikut : meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpendil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan, meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel; meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*); meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga

swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penggulungan kemiskinan; meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya; meningkatkan modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal; meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat. (Tim Pengendali PNPM 2007)

### **Ruang Lingkup Program PNPM Mandiri**

Masyarakat yang mandiri tidak mungkin diwujudkan secara instan, melainkan melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat, diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif. Untuk harmonisasi dan sinergi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kategori program, komponen, ruang lingkup kegiatan, dan langkah-langkah harmonisasi dalam PNPM Mandiri.

Pertama, Kategori Program, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan menjadi PNPM-Inti dan PNPM-Penguatan. PNPM-Inti terdiri dari program/kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, yang mencakup Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW), dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK). Sedangkan PNPM-Penguatan: terdiri dari program-program pemberdayaan masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan, serta khusus untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target tertentu, seperti Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), BLM untuk Ker-

inganan Investasi Pertanian (BLM KIP) dan lainnya.

Kedua, Komponen Program, rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program Pengembangan Masyarakat, Bantuan Langsung Masyarakat, Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal, serta Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program. Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemabfaatan sumberdaya, pemantauan, dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin, kelompok perempuan, petani, buruh, gurem, nelayan miskin, penyandang cacat. Selain itu juga, penderita penyakit menahun, korban bencana alam, serta konflik sosial. Komponen peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif, dan sebagainya. Komponen bantuan pengelolaan dan pengembangan program meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program.

Ketiga, Ruang Lingkup Kegiatan, ruang lingkup kegiatan PNPM-Mandiri pada dasarnya

terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat meliputi : penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya; penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dan bergulir ini (misal penambahan permodalan simpan pinjam); kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs; peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik.

Keempat, Harmonisasi Program, dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam PNPM Mandiri dilakukan harmonisasi pada aspek-aspek pemilihan sasaran, kelembagaan masyarakat dan pendanaan. Harmonisasi sasaran ditujukan untuk memadukan aspek wilayah dan kelompok masyarakat penerima manfaat. Lokasi PNPM Mandiri diutamakan pada kecamatan yang memiliki kriteria berikut; a) memiliki jumlah penduduk miskin cukup besar, b) tingkat pelayanan dasar rendah, c) tingkat kapasitas fiskal rendah, dan d) memiliki desa. Kelurahan tertinggal. Penentuan lokasi PNPM-Inti ditetapkan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri. Lokasi PNPM-Penguatan diarahkan ke lokasi PNPM-Inti dengan mempertimbangkan usulan sektor dan daerah, efisiensi dan efektivitas penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antar kecamatan. Pada tahun 2009, lokasi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan meliputi seluruh kecamatan perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Untuk tahun 2008, ketentuan pemilihan lokasi sasaran berdasarkan ketentuan: kecamatan-kecamatan yang diusulkan oleh pemerintah daerah

dalam skema kontribusi pendanaan. Kelompok Sasaran adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) di perdesaan; Kelembagaan Masyarakat di perdesaan; dan PNPM Mandiri telah dinikmati oleh 18,1 juta orang miskin, 50 persen diantaranya wanita (Sugema, Imam, 2007)

Harmonisasi kelembagaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kepemimpinan masyarakat yang terpecaya, berbasis nilai, dan menngakar; efisiensi tata kelola; efektifitas program penanggulangan kemiskinan; dan mendinging persoalan kemiskinan dan upaya penanggulangannya. PNPM Mandiri diarahkan menggunakan an mengembangkan secara optimal kelembagaan masyarakat yang telah ada, sepanjang disepakati masyarakat dan bersifat terbuka bagi seluruh warga. Dimensi lembaga masyarakat meliputi proses pengambilan keputusan dan tindakan kolektif, organisasi, serta aturan main. Harmonisasi kelembagaan dilakukan melalaui: pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan yang telah ada dengan cara meningkatkan kapasitas pengelola, memperbaiki kinerja dan etika lembaga, dan meningkatkan tingkat keterwakilan berbagai lembaga yang ada; peningkatan kerjasama antara desa/kelurahan. Musyawarah Antar Desa/Kelurahan merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan antar desa/kelurahan; konsolidasai organisasi pelaksanaan program sektor yang bersifat *ad-hoc* dan koordinasi berbagai kelompok masyarakat yang ada oleh lembaga keswadayaan masyarakat di desa/kelurahan.

Harmonisasi berbagai sumber pendanaan PNPM Mandiri bertujuan untuk meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Harmonisasi pendanaan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Provinsi dan Kabupaten/ Kota, serta lembaga masyarakat. Harmonisasi pendanaan dilakukan dengan cara konsolidasi berbagai sumber dan penggunaan dan, pembiayaan aktivitas yang tidak tumpang tindih, serta distribusi pelaku dan fungsi kinerja program. Sumber dana

pelaksana PNPM Mandiri berasal dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik yang bersumber dari Rupiah Murni maupun dari pinjaman/hibah; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, terutama untuk mendukung penyediaan dana pendamping bagi kabupaten dengan kapasitas fiskal rendah; APBD Kabupaten/Kota sebagai dana pendamping, dengan ketentuan minimal 20 (dua puluh) persen bagi kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal rendah dan minimal 50 (lima puluh) persen bagi kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal menengah ke atas dari total Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di kabupaten/kota; kontribusi swasta sebagai perwujudan tanggung sosial perusahaan (*Corporates Social Responsibility*); dan swadaya masyarakat (asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan individu/kelompok peduli lainnya).

Dana yang bersumber dari APBD, kontribusi swasta, dan swadaya masyarakat tersebut merupakan kontribusi yang harus bersinergi dengan dana dari APBN, dengan mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan negara dan mekanisme program. Dana yang berasal dari pendanaan luar negeri, baik hibah maupun pinjaman, selain mengikuti ketentuan yang berlaku juga bersifat *co-financing*, sehingga memungkinkan pemanfaatan berbagai sumber pendanaan secara optimal. Sumber-sumber dana bagi pelaksanaan PNPM Mandiri tersebut di atas digunakan untuk keperluan komponen-komponen program yaitu a) Pengembangan Masyarakat; b) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM); c) Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Pelaku Lokal; dan d) Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program. Besarnya Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat untuk setiap kecamatan dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu berdasarkan keberadaan desa tertinggal dan berdasarkan rasio penduduk miskin dan jumlah penduduk di kecamatan.

**Tabel 2**  
**Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat**  
**Keberadaan Desa Tertinggal**

Jumlah Desa Tertinggal	Alokasi BLM (Rp)
£ 3	1.000.000.000
4	1.250.000.000
5	1.500.000.000
6	1.500.000.000
7	1.750.000.000
8	2.000.000.000
9	2.250.000.000
10	2.500.000.000
11	2.750.000.000
<sup>3</sup> 12	3.000.000.000

Sumber: *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri (2008)*

**Tabel 3**  
**Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat**  
**berdasarkan Rasio Penduduk**  
**Miskin dan Jumlah Penduduk di Kecamatan**

Lokasi	Jumlah Penduduk (000)	Persentase Penduduk Miskin	Alokasi BLM (Rp)
Jawa	< 25.000	£ 40%	1.500.000.000
		> 40%	1.750.000.000
	25.000 – 50.000	£ 40%	1.750.000.000
		> 40%	2.000.000.000
	> 50.000	< 20%	2.250.000.000
		20% s.d 40%	2.500.000.000
Luar Jawa	< 15.000	£ 40%	1.500.000.000
		> 40%	1.750.000.000
	15.000 – 25.000	£ 40%	1.750.000.000
		> 40%	2.000.000.000
> 25.000	< 20%	2.250.000.000	
	20% s.d 40%	2.500.000.000	
	> 40%	3.000.000.000	

Sumber : *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri (2008)*

Tahun 2013 pemerintahan berencana menambah dana untuk penanggulangan kemiskinan selain Rp 80 triliun yang sudah dianggarkan. Selain itu seluruh dana hibah yang diterima pemerintah akan dialokasikan untuk program-program kemiskinan. Pemerintahan mendapatkan komitmen dana hibah US\$ 159 juta atau sekitar Rp 1,46 triliun dari 22 negara donatur yang akan dialokasikan untuk program kemiskinan. Adanya dana hibah tersebut diharapkan meringankan upaya pemerintah mempecepat pemberantasan kemiskinan. Dana hibah yang akan diterima pemerintah akan terus bertambah seiring munculnya keinginan dari beberapa negara donatur lain untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat miskin di Indonesia. Jumlah kecamatan yang tercakup dalam PNPM Mandiri tahun 2010 sebanyak 4.200 kecamatan. Saat ini, sedang berlangsung proses pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri di 16.417 desa tertinggal dan sekitar 21.00 desa lainnya. Dari Tahun 2009, seluruh kecamatan di Indonesia yang berjumlah sekitar 6.408 kecamatan sudah mendapat PNPM Mandiri.

### Tahapan Operasional PNPM Mandiri

Strategi Operasional PNPM Mandiri terdiri dari tahap pembelajaran, kemandirian, dan tahap pembelajaran, kemandirian, dan tahap keberlanjutan. Tahap pembelajaran merupakan tahap pengenalan bagi masyarakat, pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya. Pada tahap ini masyarakat dan pelaku pembangunan mulai kecamatan hingga desa/kelurahan mendapat kesempatan untuk memahami mekanisme pengelolaan pembangunan partisipatif yang ditawarkan PNPM Mandiri. Bagi pemerintah, tahap pembelajaran ditujukan sebagai wahana pembelajaran dalam penerapan pengelolaan pembangunan partisipatif; dan penerapan model kerjasama antara pemerintah nasional dan pemerintah kabupaten/kota dalam mempersiapkan,



melaksanakan dan mengendalikan program. Tahap pembelajaran membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun, tergantung kepada kondisi wilayah dan kesiapan masyarakatnya. Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan pada tahap ini adalah bantuan pendanaan merupakan faktor utama penggerak proses pemberdayaan masyarakat dibandingkan pada tahap lain. Keberadaan bantuan pendanaan merupakan media untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa mereka mampu menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan bagi masyarakat dan daerahnya sendiri; disediakan bantuan pendanaan dan pendampingan secara khusus terhadap perempuan, atau kelompok lain yang terpinggirkan (minimal 30% dari alokasi Bantuan Langsung Masyarakat); peran pendamping (fasilitator/konsultan) dalam memfasilitasi proses pelaksanaan PNPM Mandiri masih sangat dominan; rasa kepemilikan program dari masyarakat, lembaga sosial dan pemerintah desa dan daerah belum cukup kuat dan masih sangat tergantung kepada fasilitator dan konsultan; untuk mengurangi tingkat ketergantungan masyarakat kepada konsultan, fasilitator dan konsultan secara taktis dan sistematis harus memberi kepercayaan kepada pelaku pembangunan di tingkat lokal untuk memfasilitasi proses pelaksanaan PNPM Mandiri; dan proses perencanaan partisipatif belum terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan reguler.

Tahap kemandirian adalah proses pendalaman atau intensifikasi dari tahap internalisasi. Tahap ini dimulai di lokasi-lokasi dimana masyarakat sudah pernah melaksanakan program pemberdayaan melalui proses pelembagaan pengelolaan pembangunan partisipatif di desa/kalurahan dan kecamatan; pelembagaan pengelolaan pendanaan mikro yang berbasis masyarakat untuk melayani masyarakat miskin; dan peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal dalam pengelolaan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan/

tahap kemandirian ini membutuhkan waktu kurang lebih dua tahun. Hal yang perlu diperhatikan dalam tahapan adalah: bantuan pendanaan lebih bersifat stimulan sehingga dan dari swadaya maupun sumber lainnya merupakan faktor penggerak pembangunan masyarakat dan daerahnya; fasilitasi pelaksanaan PNPM Mandiri lebih banyak dilakukan oleh pelaku pembangunan lokal dari masyarakat sendiri; rasa kepemilikan program dari masyarakat dan pemerintah daerah sudah cukup kuat, sehingga peran fasilitator/konsultan lebih difokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat, pelaku pembangunan lokal dan perangkat pemerintah daerah; masyarakat, pemerintah daerah; masyarakat, pemerintah daerah; konsultan dan fasilitator sudah merupakan mitra sejajar; dan proses perencanaan partisipatif telah terintegrasi ke dalam sistem perencanaan pembangunan reguler.

Tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan waktu setidaknya satu tahun. Pada tahap keberlanjutan masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil, semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan; perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan; kapasitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan; dan keberadaan fasilitator/ konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan.

### **Siklus Pemberdayaan PNPM Mandiri**

Tahap pertama, Sosialisasi Awal dan Musyawarah Masyarakat, meliputi Kegiatan sosialisasi dan penyamaan pemahaman, prinsip, dan bagaimana program akan dilaksanakan. Tahap kedua, Mengenali Kemiskinan, meliputi identifikasi kemiskinan; kesepakatan kriteria miskin; dan merumuskan masalah dan penyebab kemiskinan. Tahap ketiga, Pemetaan Swadaya, meliputi pencacahan kepala keluarga miskin; meliputi pencacahan kepala keluarga miskin; merumuskan kebutuhan; memetakan potensi yang dapat untuk memecahkan masalah; dan merumuskan visi bersama. Tahap keempat, Pengorganisasian Masyarakat, meliputi adanya lembaga/ kelompok keswadayaan masyarakat yang dibentuk, diakui, dan dikelola oleh masyarakat secara transparan dan bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan bersama. Tahap kelima, Penyusunan Rencana, meliputi membahas berbagai kebutuhan pembangunan; dan menengah berdasarkan visi bersama, serta potensi sumber pembiayaannya. Tahap keenam, Pelaksanaan Kegiatan, meliputi pembentukan tim-tim pelaksanaan dan pemantau kegiatan di desa/kelurahan dan pertanggungjawaban kegiatan. Tahap ketujuh, Pemanfaatan dan Pemeliharaan pelayanan dan prasarana yang sudah dibangun/ dilaksanakan (Tim Pengendali PNPM Mandiri, 2007).

### **Kajian Dampak PNPM Mandiri Terhadap Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin**

Beberapa keberhasilan PNPM Mandiri terlihat dari bertambahnya penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta keberhasilan menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Berikut beberapa

contoh keberhasilan PNPM Mandiri: Warga Baturetno, Singosari, Malang, Jawa Timur, serempak bersujud mensyukuri berfungsinya sarana air bersih yang mereka bangun dengan keringat mereka sendiri, serta dukungan dana dari PNPM Mandiri Perdesaan.

Selama puluhan tahun, hidup mereka tergantung pada air kali yang berwarna kecoklatan. Mandi, cuci dan kakus semuanya dilakukan disana. Manusia dan hewan saling mandi bersama. Mulai tahun 2000, terjadi perubahan besar di desa itu. Usulan air bersih yang mereka ajukan, mendapat prioritas pendanaan dari PNPM Mandiri Perdesaan (pada saat itu bernama PPK). Sebagian besar warga terlibat dalam pengeboran, pembangunan tandon dan pipanisasi. Dalam waktu dua bulan, air bersih pun mengalir deras keluar dari bumi.

Ketika air telah mengalir ke rumah masing-masing penduduk, perubahan sosial pun terjadi. Cara mandi mereka berubah. Masyarakat yang semula tidak membangun kamar mandi, mulai membangun kamar mandinya sendiri. Mandi kini menjadi lebih bersifat individual dan memiliki ruang *privacy*. Dulu semua dilakukan bersama-sama. Kualitas air yang bersih dan bening juga telah mengubah pola minum penduduk. Saat ini penduduk desa minum lebih sering dan juga lebih banyak. Tamu yang datang ke rumah pun sudah bisa dihidangkan air teh. Dulunya, mereka hanya berani menyajikan air kopi untuk menghindari terlihatnya air yang tidak jernih.

Perubahan lain yang juga dirasakan masyarakat adalah hasil cucian yang menjadi lebih bersih. Dahulu, warna baju cepat menjadi pudar, baju putih cepat pula berubah warna menjadi kekuningan. Kini, keberadaan air bersih, telah membuat warna asli baju mereka bertahan lebih lama. (Tim Pengendali PNPM Mandiri. 2007).

Contoh lain keberhasilan PNPM Mandiri dirasakan penduduk di Kabupaten Bantul. Pada tahun 2006 PNPM – PPK lebih banyak memfokuskan rehabilitasi dan rekonstruksi

pasca gempa dengan kucuran dana 40,75 miliar untuk 17 kecamatan. Dana tersebut sesuai dengan pengajuan usulan yang disetujui dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) di setiap kecamatan. Selain digunakan untuk program ekonomi produktif yaitu berupa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) juga untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti : jalan, gedung TK, Irigasi, Jembatan, sanitasi air bersih, pasar desa dan sarana lainnya dengan total sebanyak 578 sarana dan prasarana. Untuk pembangunan sarana pendidikan telah dibangun kembali 100 gedung TK dan perbaikan 104 gedung TK dan perbaikan 104 gedung TK sehingga total bangunan 204 gedung TK.

Sedangkan untuk program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dikelola oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK). Adanya program simpan pinjam ternyata mampu mendorong perekonomian di tingkat akar rumput. Dan yang dikucurkan di setiap kecamatan sebesar 25 % adalah untuk usaha kaum perempuan yang dikelola oleh UPK. Dana tersebut digulirkan ke berbagai kelompok usaha yang dikelola perempuan. Selain dapat menghindarkan masyarakat dari jeratan rentenier dengan program SPP ini maka usaha yang dikelola perempuan juga akan mendapat pendampingan dan pembinaan sehingga diharapkan usaha yang digeluti bisa berhasil.

Kemudian pada tahun 2007 PNPM – KPK mendapat kucuran dana sebesar 14 miliar untuk menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 dan untuk melanjutkan program ekonomi produktif (SPP). Selanjutnya pada tahun 2008 ini PNPM – PPK telah berganti menjadi PNPM Mandiri Perdesaan. Adapun PNPM Mandiri Perdesaan yaitu : Kecamatan yang tidak masuk kategori kecamatan bermasalah dalam PPK, Kecamatan yang disulkan oleh Pemda dengan memberikan kontribusi dana APBD 20% dan kecamatan yang tidak dialokasikan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan. Untuk tahun 2011

pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bantul dilaksanakan di 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Dlingi, Piyungan, Imogiri, Kretek dan Pajangan. (www.Pemkab Bantul,2011)

#### Kendala Pelaksanaan PNPM Mandiri

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri terdapat beberapa kendala yang dihadapi sehingga banyak mempengaruhi efektifitas pelaksanaan program tersebut. Namun demikian, kendala yang paling dirasakan dan sangat mempengaruhi efektifitas program ini adalah perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah Tidak semua daerah mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri. Meskipun arahan dan sosialisasi telah dilakukan berulang-ulang. Alasan yang sering dikemukakan adalah mereka menganggap PNPM Mandiri ini adalah program kampanye terselubung atau *komoditi politik*, ini sangat besar pengaruhnya ketika menjelang pemilu seperti pada Tahun 2009, banyak daerah-daerah yang secara tidak langsung menghambat pelaksanaan program-program PNPM tersebut. Disamping itu ada beberapa daerah yang beranggapan bahwa dasar hukum penyediaan dana daerah untuk program ini tidak jelas, sehingga beberapa daerah menolak untuk menyediakan dana daerah untuk PNPM Mandiri, dan tidak sedikit yang tidak memberikan penjelasan sama sekali namun menolak untuk menyediakan dana daerah untuk PNPM Mandiri.

Namun demikian ada beberapa daerah yang komitmennya sangat tinggi untuk mendukung PNPM Mandiri. Bahkan untuk Tahun Anggaran 2013 sudah ada beberapa daerah yang menyatakan komitmennya untuk menyediakan Dana Daerah untuk Program Bersama (DDUPB) jauh melebihi ketentuan antara lain : Kota Palopo, Kabupaten Maros, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Maros, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Paser.

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah melalui mekanisme kerjasama. Penyerahan dana daerah bagi PNPM Mandiri ditujukan untuk membangun

pemahaman bahwa penanggulangan kemiskinan adalah upaya bersama, mendorong pemerintah daerah menjaankan program-program pro rakyat melatih aparat pemerintah daerah untuk mendorong masyarakatnya dalam upaya pemberdayaan masyarakat, dan untuk mewujudkan penanggulangan kemiskinan. Apabila pemerintah daerah tidak menyediakan DDUPB, maka jumlah BLM bagi masyarakat miskin di daerah tersebut berkurang dan semakin sedikit warga miskin yang dapat memanfaatkan program ini.

---

## KESIMPULAN DAN SARAN

---

Keberadaan program nasional PNPM Mandiri dirasa sangat besar manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin dengan penanaman sikap kemandirian dalam pengambilan keputusan. Pelaksanaan program ini akan berhasil jika ada kerjasama yang harmonis antara masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya.

Kegiatan PNPM Mandiri pada dasarnya meliputi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan, yaitu penyediaan dan perbaikan sarana/prasarana lingkungan, penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin, kegiatan yang terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal. Tahapan operasional PNPM Mandiri terdiri dari tahap pembelajaran, kemandirian, dan tahap keberlanjutan. Tahap pembelajaran merupakan tahap pengenalan bagi masyarakat, pemerintah, dan pelaku pembangunan lainnya. Tahap kemandirian adalah proses pendalaman atau intensifikasi dari tahap internalisasi, dan tahap keberlanjutan adalah proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri.

Dalam pelaksanaannya banyak kendala yang dihadapi yaitu tidak semua daerah mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri meskipun ada beberapa daerah yang komitmennya sangat tinggi untuk mendukung PNPM Mandiri. Dibutuhkan kesungguhan pemerintah melaksanakan program ini mengingat belum semua masyarakat miskin merasakan manfaat program PNPM Mandiri.

---

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Badan Pusat Statistik. (2010). *Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. (2011). *Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Departemen Dalam Negeri. (2008). "Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri". Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
- Kartawijaya, Mira. (2007). "Perdagangan Manusia akibat Kemiskinan". *Harian Suara Merdeka*. 12 September
- Kuncoro, Mudrajad. (1997). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Marwaan, Markar. (2008). "Indonesia: Jakarta Says Thanks But Not Again, To IMF Loan". *Global Information Network*. New York. 26 November
- Saraswati, Idha. (2008). "Pengusaha Angkutan Sulit Turunkan Tarif". *Kompas*. 14 November
- Sharp, Ansel M., Charles A., Paul W. (1996). *Economic of Social Issues*, edisi ke 12. Chicago: Richard D. Irwin.
- Sugema, Imam. (2007). "Anggaran untuk Kemiskinan dan Pengangguran?". *Kompas* 17 Juli

- Tim Pengendali PNPM Mandiri. (2007). *Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri*. Jakarta
- Tim Pengendali PNPM Mandiri. (2007). *Buku Saku PNPM Mandiri*. Jakarta
- Todaro, P., dan Smith, Stephen C. (2004). (terj. Haris Munandar). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Urip, Sunaryo. (2007). “Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Faktor Penyebabnya”. ([www.pse.litbang.deptan.go.id](http://www.pse.litbang.deptan.go.id))
- \_\_\_\_\_ (2005). “Busung Lapar akibat Kemiskinan”. *Harian Suara Merdeka*. 12 Juni. ([www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com).)
- \_\_\_\_\_ 2008. “Sujud Bersama Syukuri Hasil PNPM Mandiri” ([info@pnpm-mandiri.org](mailto:info@pnpm-mandiri.org).)
- \_\_\_\_\_ (2008). “Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bantul”. ([www.bantulkab.go.id](http://www.bantulkab.go.id))
- \_\_\_\_\_ (2008). “Sejumlah Daerah Tolak PNPM Mandiri” ([www.waspada.co.id](http://www.waspada.co.id))
- Indonesia Expanding Horizon. (2008). “Mengurangi Kemiskinan. ([www.siteresources.worldbank.com](http://www.siteresources.worldbank.com))